



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA



<https://pttun-surabaya.go.id> 

(031) 8292138 

[persuratanpttunsby@gmail.com](mailto:persuratanpttunsby@gmail.com) 

Jalan Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya 

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023 dapat kami sajikan.

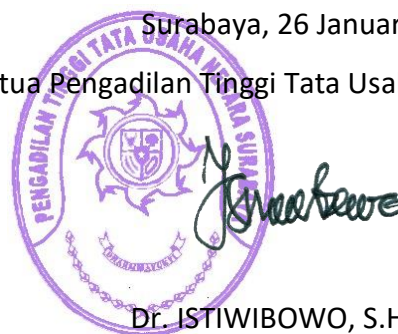
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 yang sudah tersusun ini menyajikan informasi yang disertai data mengenai pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bersumber dari unit pengolah data pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Informasi dan data yang tersaji merupakan kompilasi kegiatan yang juga melibatkan satuan kerja di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya selama Tahun 2023. Dan semoga kekurangan dari laporan ini menjadi koreksi bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Namun jika ada kelebihannya akan menjadikan semangat bagi kami untuk dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun mendatang.

Surabaya, 26 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Wilayah Hukum .....	3
Bab I Pendahuluan .....	5
A. Kebijakan Umum Pengadilan .....	5
B. Visi dan Misi .....	6
C. Indikator Kinerja Utama .....	7
Bab II Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara .....	8
A. Keadaan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara .....	8
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	8
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	10
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	11
B. Penyelesaian Perkara .....	11
1. Jumlah sisa perkara yang diputus .....	11
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	11
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK .....	12
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan) .....	14
Bab III Sumber Daya Manusia .....	15
A. Mutasi .....	17
B. Promosi .....	21
C. Pensiun .....	23
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) .....	25
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi .....	45
A. Pengelolaan Keuangan .....	45
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	47
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	51
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik .....	52
• Akreditasi Penjaminan Mutu .....	52
• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	52
• Inovasi Pelayanan Publik .....	52
Bab VI Pengawasan .....	54
A. Internal .....	54
B. Evaluasi .....	54
Bab VII Penutup .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Rekomendasi .....	58

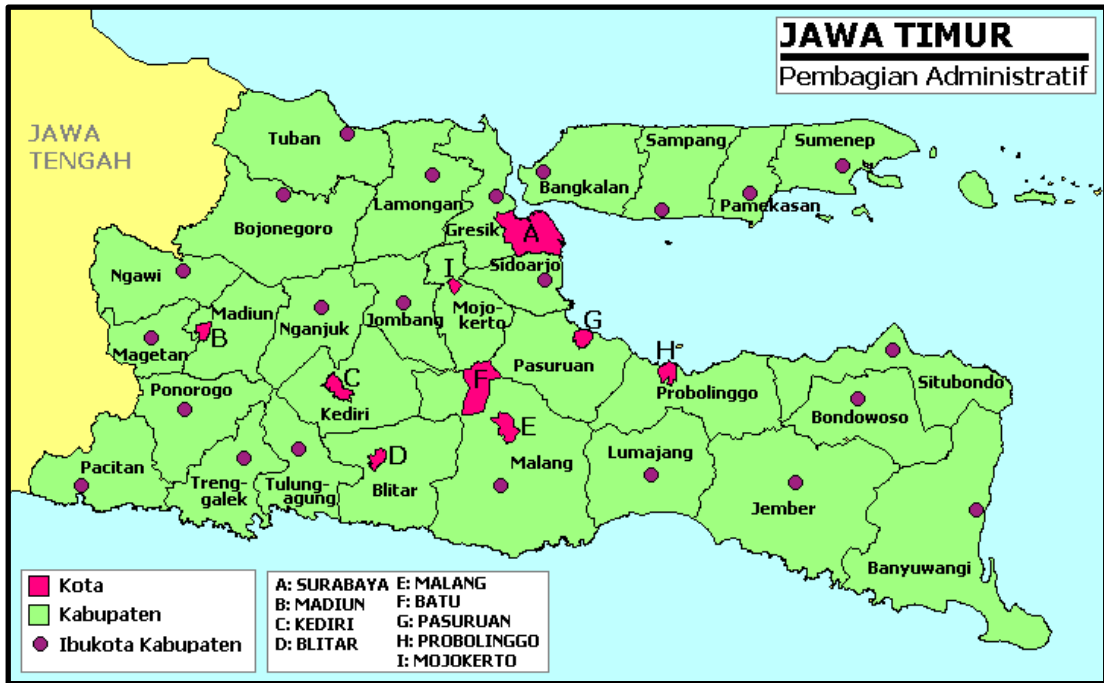
## WILAYAH HUKUM PTTUN SURABAYA



GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
JL. KETINTANG MADYA VI NO. 2 SURABAYA



Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut pemerintah melalui aparatnya di bidang Tata Usaha Negara (TUN) diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian pembangunan hukum nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI No. II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Memang peradilan di bidang Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikeluarkan pada tahun 1986 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru bisa diterapkan 5 (lima) tahun kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan kepentingan, perselisihan / sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Pebruari 1993 adalah merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, maka Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meliputi daerah propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara yang dimintakan Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu dari :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan:

- a. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama dan terakhir;
- b. Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan tehnik yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- d. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- e. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset / penelitian.

## **B. VISI DAN MISI**

Adapun Visi Badan Peradilan (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035 sebagai berikut :

Visi Badan Peradilan adalah : ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***

Oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan bagian dari Badan Peradilan, maka visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengacu dan berpedoman pada visi Badan Peradilan tersebut, yaitu :

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya : ***“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung”***

Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui misi. Sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035, adapun Misi Badan Peradilan adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tgl. 31 Januari 2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dapat digambarkan pada matriks di bawah ini :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu



## BAB II MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

### A. KEADAAN PERKARA

#### 1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Daerah hukum yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu meliputi Wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya meliputi 3 (tiga) wilayah Provinsi saja. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang tersebut, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut ini merupakan Keadaan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN Surabaya), Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang), dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (PTUN Yogyakarta).

**Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

No.	Satuan Kerja	Sisa 2022	Masuk	Putus	Cabut	Dissmisal	Perlawanan	Sisa 2023
1.	PTUN Surabaya	95	205	167	67	13	2	51
2.	PTUN Semarang	30	97	76	20	0	0	31
3.	PTUN Yogyakarta	2	20	9	7	2	0	4
<b>Jumlah</b>		<b>127</b>	<b>322</b>	<b>252</b>	<b>94</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>86</b>

#### 2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Keadaan Perkara yang diajukan banding pada pengadilan tingkat pertama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Tahun 2023, termasuk sisa perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang belum putus, digambarkan sebagai berikut:

**Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

No.	Satuan Kerja	Sisa 2022	Masuk	Putus	Sisa 2023
1.	PTUN Surabaya	8	132	133	7
2.	PTUN Semarang	3	51	50	4
3.	PTUN Yogyakarta	1	4	5	0
4.	PTUN Denpasar	0	0	0	0
4.	PTUN Mataram	1	0	1	0
6.	PTUN Kupang	1	0	1	0
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>187</b>	<b>190</b>	<b>11</b>

Pada tahun 2023, perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 187 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2022 yang belum diselesaikan sejumlah 14 Perkara, sehingga beban perkara yang harus diselesaikan di tahun 2023 adalah sejumlah 201 Perkara.

Dari keseluruhan perkara di tahun 2023 sejumlah 201 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 190 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2023 adalah sejumlah 11 Perkara.

Berikut dapat digambarkan jenis perkara tingkat banding di tahun 2023 dalam matriks tabel dan diagram di bawah ini:

**Tabel Jenis Perkara Banding Tahun 2023**

NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	DISMISSAL	PERLAWANAN	CABUT	PUTUS	SISA TAHUN INI
1	Pertanahan	8	112	0	0	1	113	6
2	Kepegawaian	0	10	0	0	0	10	0
3	Perijinan	0	3	0	0	0	3	0
4	Lingkungan Hidup	0	1	0	0	0	1	0
5	Tender/Pengadaan Barang Dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0
6	Badan Hukum/Parpol	0	0	0	0	0	0	0
7	Kades & Perangkat Desa	2	32	0	0	0	31	3
8	Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	0
9	Proses Pemilu	0	0	0	0	0	0	0
10	P A W	0	1	0	0	0	1	0
11	Ketenagakerjaan	0	3	0	0	0	2	1
12	K I P	0	0	0	0	0	0	0
13	Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	0	0
14	Fiktif Positif	0	0	0	0	0	0	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0	0	0	0	0	0	0
16	Tindakan Admin Pemerintahan	2	5	0	0	0	7	0
17	Lelang	0	1	0	0	0	1	0
18	Lain-Lain	2	19	0	0	0	20	1
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>189</b>	<b>11</b>

Dari keseluruhan jenis perkara banding yang masuk pada tahun 2023 tersebut diatas, berikut ini merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya:

**Tabel Pengadilan Pengaju Perkara Banding Tahun 2023**

No.	Pengadilan Pengaju	Jumlah Perkara
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	132 perkara
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	51 perkara
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	4 perkara
<b>Jumlah</b>		<b>187 perkara</b>

### 3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Pada tahun 2023, terdapat perkara yang menjadi beban penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Perkara yang pertama diterima pada tanggal 22 Mei 2023 dan diregister dengan Nomor 1/G/2023/PT.TUN.SBY, serta jenis perkaranya adalah Tender. Perkara yang kedua diterima pada tanggal 7 November 2023 dan diregister dengan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.SBY, serta jenis perkaranya adalah Kepegawaian. Penanganan dan penyelesaian perkara Kepegawaian oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan.

Terhadap kedua perkara yang mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, perkara Nomor 1/G/2023/PT.TUN.SBY telah putus pada tanggal 22 Agustus 2023, dan telah dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan perkara Nomor 2/G/2023/PT.TUN.SBY masih dalam proses persidangan, dan menjadi sisa perkara yang menjadi beban penyelesaian perkara tahun 2024.

Pada perkara yang diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, terdapat 82 (delapan puluh dua) pengajuan permohonan Kasasi. Sejumlah 60 (enam puluh) perkara diantaranya telah diputus Mahkamah Agung, dan 22 diantaranya belum diputus, sehingga masuk pada kategori sisa perkara yang diajukan Kasasi Tahun 2023. Terhadap rincian dari data keadaan perkara Kasasi pada Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

No.	Pengadilan	Permohonan Kasasi	Putus	Sisa
1	PTUN Surabaya	46	32	14
2	PTUN Semarang	34	27	7
3	PTUN Yogyakarta	2	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>60</b>	<b>22</b>

#### 4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Perkara yang diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, belum ada yang diajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2023. Sedangkan terhadap perkara yang diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, terdapat 23 (dua puluh tiga) perkara yang diajukan Peninjauan Kembali di Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

No.	Pengadilan	Permohonan Peninjauan Kembali
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	13
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	10
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	0
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>

#### B. PENYELESAIAN PERKARA

##### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sebagaimana data yang telah diuraikan diatas, jumlah keseluruhan beban perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding di tahun 2023 adalah 201 (dua ratus satu) Perkara (termasuk sisa perkara tahun lalu). Perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2023 adalah sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus pada tahun 2023 sehingga menjadi beban perkara tahun 2024 adalah sejumlah 11 (sebelas) perkara.

Adapun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sisa perkara pada tahun 2023 yang menjadi beban perkara pada tahun 2024, yaitu digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Sisa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

NO	Pengadilan	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus	Sisa
1	PTUN Surabaya	95	205	249	51
2	PTUN Semarang	30	97	96	31
3	PTUN Yogyakarta	2	20	18	4
<b>Jumlah</b>		<b>127</b>	<b>322</b>	<b>363</b>	<b>86</b>

##### 2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Keseluruhan perkara banding yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Tahun 2023, telah diselesaikan dan diputus tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yaitu dalam waktu 5 (lima) bulan di tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan di tingkat banding.

**Tabel Waktu Penyelesaian Perkara Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

NO	Wilayah Pengadilan Tinggi	Rentang Waktu Memutus				Ket.
		1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan	
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding	√	-	-	-	Perkara yang diputus sejumlah 190 Perkara

Waktu penyelesaian perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, digambarkan melalui tabel, sebagai berikut:

**Tabel Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

NO	Pengadilan	Rentang Waktu Memutus (Bulan)*			Ket.
		3 - 5	5 - 12	> 12	
1	PTUN Surabaya	210	38	0	*Jumlah Perkara
2	PTUN Semarang	89	7	0	
3	PTUN Yogyakarta	17	1	0	
<b>Jumlah</b>		<b>316</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	

### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Berdasarkan keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Tingkat Banding, jumlah 190 perkara putus yang tidak mengajukan kasasi dan peninjauan kembali dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Perkara Putus yang Tidak Diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya**

Ket.	Perkara Putus	Diajukan Upaya Hukum		Tidak Ajukan Upaya Hukum	
		Kasasi	PK	Kasasi	PK
Jumlah	190	69	22	121	168
Persen	100%	36,32 %	11,58 %	63,68 %	88,42 %

Sedangkan perkara yang tidak diajukan upaya hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, digambarkan melalui tabel, sebagai berikut:

**Tabel Perkara Putus yang Tidak Diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada  
Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Tahun 2023**

Pengadilan (PTUN)	Perkara Putus	Diajukan Upaya Hukum			Tidak Ajukan Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Surabaya	249	147	46	13	102	203	236
Semarang	96	50	34	10	46	62	86
Yogyakarta	18	4	2	0	14	16	18
<b>Jumlah</b>	<b>363</b>	<b>201</b>	<b>82</b>	<b>23</b>	<b>162</b>	<b>281</b>	<b>340</b>

Berdasarkan kedua tabel tersebut, terdapat perbedaan jumlah perkara yang tidak diajukan kasasi, yaitu pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 69 perkara, dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 82 perkara. Adanya selisih 13 perkara tersebut dikarenakan tidak semua jenis perkara yang diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara tersedia upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, melainkan langsung dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Jenis perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak tersedia upaya hukum banding, akan tetapi tersedia upaya hukum Kasasi adalah perkara Sengketa Informasi Publik (KIP) dan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pengadaan Tanah). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk perkara KIP dapat langsung diajukan upaya kasasi berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dan perkara Pengadaan Tanah yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasar pada Laporan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tidak ada perkara Pengadaan Tanah yang diajukan kasasi, akan tetapi terdapat 6 perkara KIP yang dimohonkan kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan 7 perkara KIP yang dimohonkan kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Pengadilan Pengaju. Adanya selisih 13 perkara sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, lebih jelasnya digambarkan dalam tabel yang didasarkan pada Laporan Tahunan Tahun 2023 Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai berikut:

No.	Pengadilan	Sengketa Informasi Publik (KIP)	Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pengadaan Tanah)	Jumlah
1.	PTUN Surabaya	6	0	6
2.	PTUN Semarang	7	0	7
3.	PTUN Yogyakarta	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

#### 1. POSBAKUM

Data Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, digambarkan melalui tabel, sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

No.	Pengadilan	Bulan Ke-											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	PTUN Surabaya	10	14	14	10	13	14	14	14	14	17	17	11
2	PTUN Semarang	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	11	10
3	PTUN Yogyakarta	6	12	13	9	9	10	9	10	11	8	10	7
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>28</b>
		<b>396</b>											

#### 2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Tidak ada pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun pelayanan terpadu dilaksanakan pada penyediaan layanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang terdiri dari pelayanan pada Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan berdasarkan Pasal 14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### 3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Implementasi perkara prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Perkara Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023**

No.	Pengadilan	Bulan Ke-											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	PTUN Surabaya	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
2	PTUN Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PTUN Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3</b>											

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Pemerintah yang melayani masyarakat dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan sikap profesionalnya, yang diwujudkan dengan peningkatan wawasan berfikir kreatifitas dan bertanggungjawab. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Peradilan, pemahaman sikap profesional dirasakan sangat penting, hal ini guna mewujudkan Aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat dan tepat.

Pembinaan Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karier Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan Kejurusitaan, serta Pemberhentian Pegawai.

#### Komposisi SDM wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

NO.	URAIAN	PTTUN SBY	PTUN SBY	PTUN SMG	PTUN YK	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketua	1	1	1	1	4
2.	Wakil Ketua	1	1	1	1	4
3.	Hakim Tinggi	8	-	-	-	8
4.	Hakim	-	20	20	6	46
5.	Hakim Yustisial	-	-	-	-	-
6.	Panitera	1	1	1	1	4
7.	Sekretaris	1	1	1	1	4
8.	Kabag. Perencanaan dan KP	1	-	-	-	1
9.	Kabag. Umum dan Keuangan	1	-	-	-	1
10.	Panitera Muda Perkara	1	1	1	1	4
11.	Panitera Muda Hukum	1	1	1	1	4
12.	Kasubag. Renang	1	-	-	-	1
13.	Kasubag. KP dan TI	1	-	-	-	1
14.	Kasubag. TU dan RT	1	-	-	-	1
15.	Kasubag. KU dan Pelaporan	1	-	-	-	1
16.	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	-	1	1	1	3
17.	Kasubag. KP, Organisasi, dan Tata Laksana	-	1	1	1	3
18.	Kasubag. Umum dan Keuangan	-	1	-	1	2
19.	Panitera Pengganti	17	16	13	7	53
20.	Jurusita Pengganti	-	3	3	4	10
21.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	-	1	-	2	3
22.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	-	-	1	-	1
23.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2	1	1	1	5



24.	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	-	1	1
25.	Pranata Komputer Ahli Muda	-	-	1	-	1
26.	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	1	1	-	2
27.	Operator - Penata Layanan Operasional	2	1	-	2	5
28.	Operator- Teknisi Sarana dan Prasarana	-	1	1	-	2
29.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	3	3	3	1	10
30.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	2	-	-	2	4
31.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	2	-	-	2	4
32.	Klerek – Pengadministrasi Perkantoran	-	-	2	1	3
33.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1	-	-	-	1
34.	Perencana Ahli Pertama	1	-	-	-	1
35.	Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	1
36.	Arsiparis Ahli Muda	-	-	-	1	1
37.	Arsiparis Ahli Madya	-	-	1	-	1
38.	Pustakawan Ahli Muda	-	-	-	1	1
39.	Pustakawan Ahli Pertama	-	-	1	-	1
40.	Pengelola Perkara	-	-	1	-	1
41.	Komandan Petugas Keamanan	-	-	-	1	1

Dilihat dari daftar keadaan pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas terdapat pemetaan Pejabat Pelaksana yang ditempatkan pada Sub Bagian menurut kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Pejabat Pelaksana tersebut. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 187/SEK/SK/IV/2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Pada tabel Komposisi Sumber Daya Manusia di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas terdapat pemetaan sebanyak 8 Jabatan Pelaksana dan 15 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Dari tabel tersebut dapat terlihat masih banyak Sub Bagian yang masih kurang jumlah Pejabat Pelaksananya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing - masing Sub Bagian, terutama pada Sub Bagian yang belum memiliki Pejabat Pelaksana yang notabene pekerjaan sangat banyak, simultan dan kondisional. Hal ini terlihat jelas sangat kekurangan Tenaga Pejabat Pelaksana.

Dari rekrutmen Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI setiap tahunnya baik melalui Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis, masih belum mencukupi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Satuan Kerja dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya Mahkamah Agung RI apabila melaksanakan rekrutmen Pegawai di Tahun 2024 bisa memberikan tambahan Pegawai di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, khususnya Pejabat Pelaksana sesuai dengan jumlah maupun tingkat pendidikan yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas – tugas baik di Kepaniteraan dan sebagai supporting unit pengadilan di Kesekretariatan.

#### A. MUTASI.

Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian Pimpinan terhadap bawahan. Mutasi dilakukan antara lain bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara Sumber Daya Manusia yang ada dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai dan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh proses mutasi yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Berikut adalah daftar nama Hakim Tinggi, Hakim dan Pegawai yang melaksanakan mutasi keluar dan masuk dari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

#### Daftar nama Hakim Tinggi, Hakim dan Pegawai yang mutasi masuk ke wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

No.	Nama/NIP	Satker Asal	Satker Tujuan	SK
1	2	3	4	5
<b>Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</b>				
1.	Fari Rustandi, S.H., M.H. NIP. 1960004231986031002	PTTUN Makassar	PTTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
2.	Riyanto, S.H. NIP. 195803181985121001	PTTUN Medan	PTTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
3.	Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H. NIP. 196104221983031003	PTTUN Makassar	PTTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
4.	Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H. NIP. 196204271987031006	PTTUN Medan	PTTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
5.	Lieke Diah Setiawati, S.H., M.H. NIP. 197211081994032003	PTUN Surabaya	PTTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 126/KM/SK/VI/2023
6.	Asnawi, S.H., M.H. NIP. 197003241991031005	PTUN Surabaya	PTTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 126/KM/SK/VI/2023
7.	H. Dwi Riyadi, S.H.,M.Kn. NIP. 196408041992031003	PTUN Mataram	PTTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 126/KM/SK/VI/2023
8.	Irfas Kurniawan, A.Md.Ak. NIP. 199706032020121004	PTUN Ambon	PTTUN Surabaya	SK Sekretaris MA RI Nomor 1609/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 06 Oktober 2023
9.	Muhammad Ilham Hanifil Ishom, S.IP. NIP. 199304072019031009	PTUN Kendari	PTTUN Surabaya	SK Sekretaris MA RI Nomor 2071/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 31 Oktober 2023

Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya				
10.	Haryati, S.H., M.H. NIP. 197306271993031002	Ketua PTUN Denpasar	Wakil Ketua PTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
11.	Suhendra, S.H., M.H. NIP. 196805251992031006	Panitera PTUN Serang	Panitera PTUN Surabaya	SK Dirjen Badilmiltun Nomor 416/DjMT/KEP/KP.04.5/XI/2022
12.	H. Husban, S.H., M.H. NIP.197212231992031002	Ketua PTUN Bandar Lampung	Ketua PTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
13.	Kemas Mendi Zاتمiko, S.H., M.H. NIP.197705052005021001	Hakim PTUN Bandar Lampung	Hakim PTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
14.	Fadholy Hernanto, S.H., M.H. NIP.198207302008051001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
15.	Diana Yustikasari, S.H. NIP.197906292009122001	Hakim PTUN Mataram	Hakim PTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
16.	Hulul, S.H. NIP.197106211998031003	Panitera PTUN Makassar	Panitera PTUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 194/KMA/SK/IX/2023
17.	Retno Andjar Sari, S.Kom. NIP.198806172009042014	Penata Layanan Operasional PTTUN Surabaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Surabaya	SK Sekretaris MA RI Nomor 1502/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023
18.	SUGIYANTO, S.H., M.H./ NIP. 197009061991031005	PTUN Gorontalo	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
19.	SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H. NIP. 198101082006042003	PTUN Pontianak	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
20.	AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H./ NIP. 198108182005022003	PTUN Yogyakarta	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
21.	LUTHFIE ARDHIAN, S.H./ NIP. 197703122009041001	PTUN Yogyakarta	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
22.	FENI ENGGARWATI, S.H./ NIP. 198612092009122003	PTUN Banjarmasin	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
23.	Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 198804122009122002	PTUN Bandar Lampung	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 244/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023
24.	Anita Linda Sugiarto, S.TP., S.H., M.H. NIP. 198107042009042006	PTUN Mataram	PTUN Yogyakarta	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
25.	Dedi Wisudawan Gamadi,S.H., M.Kn. NIP. 197812152007041001	PTUN Bandar Lampung	PTUN Yogyakarta	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
26.	Andrie Wibowo, S.H. NIP. 198410182011011009	PTUN Samarinda	PTUN Yogyakarta	SK Dirjen Badilmiltun Nomor 416/DjMT/KEP/KP.04.5/XI/2022
27.	Suzi Marlina Butar Butar, S.E.,M.Si NIP. 197810102011012006	Pengadilan Militer Utama Jakarta	PTUN Yogyakarta	SK Sekretaris MA RI Nomor 108/SEK/KP.1/SK/II/2023
28.	Delta Arga Prayudha, S.H.,M.H. NIP. 198705272009121002	PTUN Bengkulu	PTUN Yogyakarta	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023

29.	Rut Endang Lestari, S.H. NIP. 197609302001122002	PTUN Jakarta	PTUN Yogyakarta	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
30.	Ikanovia Purwantati, A.Md NIP. 199507282020122009	Pengadilan Tinggi Agama Palu	PTUN Yogyakarta	SK Sekretaris MA RI Nomor 1608/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023

**Daftar nama Hakim Tinggi, Hakim dan Pegawai yang mutasi keluar dari wilayah hukum Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :**

No.	Nama/NIP	Satker Asal	Satker Tujuan	SK
1	2	3	4	5
<b>Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</b>				
1.	A.K. Setiyono, S.H., M.H. NIP. 196004121988031003	PTTUN Surabaya	PTTUN Manado	SK Ketua MA RI Nomor 244/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023 23 November 2023
2.	Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H. NIP. 196102091986032001	PTTUN Surabaya	PTTUN Mataram	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 16 Mei 2023
3.	Gayuh Rahantyo, S.H. NIP. 198406142009041005	PTTUN Surabaya	PTUN Bandar Lampung	SK Ketua MA RI Nomor KMA No. 111/KMA/SK/VI/2023 9 Juni 2023
4.	Retno Andjar Sari, S.Kom. NIP. 198806172009042014	Penata Layanan Operasional PTTUN Surabaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Surabaya	SK Sekretaris MA RI Nomor 1502/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023
<b>Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</b>				
5.	R.Basuki Santoso, S.H., M.H. NIP. 196603091992031002	Wakil Ketua PTUN Surabaya	Hakim Tinggi PT TUN Makassar	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
6.	Rosidah, S.H. NIP. 197711172001122002	Hakim PTUN Surabaya	Wakil Ketua PTUN Kendari	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
7.	Ganda Kurniawan, S.H. NIP. 198301312007041001	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
8.	Tedi Romyadi, S.H., M.H. NIP. 196202041980121001	Ketua PTUN Surabaya	Ketua PTUN Makassar	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
9.	Rialam Sihite, S.H., M.H. NIP. 197004271996032004	Hakim PTUN Surabaya	Wakil Ketua PTUN Gorontalo	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
10.	Muhammad Iqbal M, S.H. NIP. 197704282006041002	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Bandung	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
11.	Lieke Diah Setiawati, S.H., M.H. NIP. 197211081994032003	Panitera Pengganti PTUN Surabaya	Panitera Pengganti PT TUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 126/KM/SK/VI/2023
12.	Asnawi, S.H., M.H. NIP. 197003241991031005	Panitera Pengganti PTUN Surabaya	Panitera Pengganti PT TUN Surabaya	SK Ketua MA RI Nomor 126/KM/SK/VI/2023
13.	Suhendra, S.H., M.H. NIP. 196805251992031006	Panitera PTUN Surabaya	Panitera PTUN Bandung	SK Ketua MA RI Nomor 194/KMA/SK/IX/2023
14.	Yuliant Prajaghupta, S.H. NIP. 197807202005021002	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	SK Ketua MA RI Nomor 224/KMA/SK.KP.4.1.3/XI/2023

				-Belum Melaksanakan Tugas
15.	RIDWAN AKHIR, S.H., M.H./ NIP. 197307232006041002	PTUN Semarang	PTUN Jakarta	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
16.	Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H./ NIP. 198006152007041001	PTUN Semarang	PTUN Bandung	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
17.	DEDY KURNIAWAN, S.H./ NIP. 197612032003121001	PTUN Semarang	PTUN Bandung	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
18.	ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H./ NIP. 197611072006041003	PTUN Semarang	PTUN Jakarta	SK Ketua MA RI Nomor 244/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023
19.	Rahmi Afriza, S.H.,M.H. NIP. 198304102006042003	PTUN Yogyakarta	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 340/KMA/SK/XI/2022 tanggal 28 November 2022
20.	Fiertasari Windiyani, S.E. NIP. 198011062011012004	PTUN Yogyakarta	PN Surakarta	SK Sekretaris MA RI Nomor 479/SEK/Kp.I/SK/IV/2023
21.	Agustin Andriani, S.H. NIP. 198108182005022003	PTUN Yogyakarta	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
22.	Luthfie Ardian , S.H. NIP. 197703122009041001	PTUN Yogyakarta	PTUN Semarang	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023
23.	Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H. NIP. 196909251990031002	PTUN Yogyakarta	PTUN Bandar Lampung	SK Ketua MA RI Nomor 90/KMA/SK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023

Dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka dipandang perlu melaksanakan pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat disini merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Pada Tahun 2023 Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka dalam rangka percepatan Layanan Kenaikan Pangkat Mutasi Pegawai Negeri Sipil berbasis Sistem Elektronik, dengan berpedoman pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 November 2022, dalam penyelesaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi BKN yaitu Sistem Informasi ASN (SIASN) berdasarkan kewenangannya. Pengadilan Tingkat Banding diberikan wewenang untuk mengusulkan, memvalidasi dan memverifikasi melalui aplikasi SIASN untuk setiap usul pangkat, baik yang berasal dari Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan Satuan Kerja di Lingkungan Kerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut setiap satuan kerja diwajibkan untuk selalu mengupdate (memperbaharui) setiap data pegawai pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI dan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga proses usul, validasi dan verifikasi dapat berjalan dengan lancar dan usul kenaikan pangkat setiap pegawai dapat berjalan tepat waktu sesuai periode berjalan.

Selama tahun 2023 usul kenaikan pangkat periode April yang masuk ke daftar monitoring PTTUN Surabaya adalah sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) Orang yang terdiri dari tenaga teknis yakni sebanyak 17 (Tujuh Belas) Orang, non teknis sebanyak 20 (Dua Puluh) Orang. Namun setelah diresmikannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Desember 2022, usul pangkat dari Satuan Kerja yang semula masuk dalam wilayah Hukum PT TUN Surabaya dan sudah diterima di PT TUN Surabaya yaitu dari PTUN Denpasar, PTUN Kupang, PTUN Mataram diserahkan ke PTTUN Mataram untuk selanjutnya di proses sesuai kewenangannya sebanyak 8 (delapan) usul pangkat, sisa 29 (dua puluh Sembilan) usul di proses di PT TUN Surabaya dan tidak ada yang ditolak. Seluruh usulan kenaikan pangkat tenaga teknis telah dikirim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI. Pada periode Oktober 2023 yang masuk ke daftar monitoring Kenaikan Pangkat PTTUN Surabaya adalah sebanyak 6 (Enam) Orang yang terdiri dari tenaga teknis yakni sebanyak 1 (Satu) Orang, non teknis sebanyak 5 (Lima) Orang dan tidak ada yang ditolak. Seluruh usulan kenaikan pangkat tenaga teknis telah dikirim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI.

## B. PROMOSI.

Promosi adalah proses kegiatan pemindahan pegawai dari suatu jabatan kepada jabatan lain yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, baik Jabatan Struktural maupun Fungsional.

Sesuai dengan prinsip *The Right Man in The Right Place*, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang akan diusulkan untuk menduduki suatu jabatan struktural tertentu diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan yang obyektif, yang nantinya dipakai sebagai bahan rekomendasi bagi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengusulkan usulan tersebut ke Mahkamah Agung RI.

Untuk menjamin adanya obyektifitas dari penilaian dan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk suatu tim yaitu Komite Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Komite BAPERJAKAT), di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Komite Baperjakat tersebut telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 1655/KPTTUN.W3-TUN/KP4.1.4/XI/2023 Tanggal 16 November 2023 Perihal Perubahan Kedua Tim Baperjakat (Tim Promosi Dan Mutasi) PNS Di Lingkungan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun laporan hasil Rapat Baperjakat tersebut adalah sebagai berikut :

### Usul Promosi Jabatan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023

No.	Jabatan Yang Akan Diisi	Alasan Pengisian Jabatan	Calon Yang Diusulkan	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</b>				
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Surabaya	Pengisian jabatan struktural dan promosi	Retno Andjar Sari, S.Kom.	1. Tim Komite Baperjakat merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk

				<p>mengusulkan Sdri. Retno Andjar Sari, S.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ke Sekretaris Mahkamah Agung RI.</p> <p>2. Bahwa Sdri. Retno Andjar Sari, S.Kom. telah dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30-10-2023.</p>
<b>Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</b>				
2.	Panitera Muda Perkara PTUN Surabaya	Pengisian jabatan struktural dan promosi	Wiwied Kurniawan, S.H., M.H.	SK Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor: 416/DjMT/KEP/KP.04.5.XI.2023 Dilantik tanggal 2 Januari 2023
3.	Panitera Muda Hukum PTUN Surabaya	Pengisian jabatan struktural dan promosi	Eko Prasetyowati, S.H., M.H.	SK Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor: 416/DjMT/KEP/KP.04.5.XI.2023 Dilantik tanggal 2 Januari 2023
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda PTUN Surabaya	Promosi Jabatan	Leni Susilowati, S.E.	Diangkat sesuai dengan SK Sekretaris MA RI Nomor 87/SEK/Kp.I/SK/II/2023 Dilantik pada tanggal 16 Maret 2023
5.	Analisis Perkara Peradilan PTUN Surabaya	Kenaikan jabatan	Dharma Setiawan Negara, S.H.	Diangkat sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 Dilantik pada tanggal 16 Maret 2023
6.	Analisis Perkara Peradilan PTUN Surabaya	Kenaikan jabatan	Isna Kartika Sari, S.H.	Diangkat sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 Dilantik pada tanggal 16 Maret 2023
7.	Panitera Pengganti PTUN Surabaya	Promosi Jabatan	Slamet Haryono, S.H.	SK Ketua MA RI Nomor 194/KMA/SK/IX/2023 Dilantik pada tanggal 30 Oktober 2023
8.	Sekretaris PTUN Semarang	Sekretaris Pensiun	Kurniawan Cahya Supraba, S.Kom., M.M.	Sudah dilantik dan menduduki jabatan Sekretaris
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Semarang	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan promosi menjadi Sekretaris sehingga jabatan tersebut kosong	Cya Purnamasari, A.Md., S.H.	Sudah diusulkan untuk mengisi jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

10.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	Ada kekosongan Jabatan Panitera Muda Hukum, dikarenakan Panitera Muda Hukum promosi sebagai Panitera Muda Perkara	RR. Tri Asih Wahyudiati, S.H.,M.Kn	Promosi diusulkan bulan Februari 2023 dan sudah ada SK Jabatan Panitera Muda Hukum yang bersangkutan. Dan sudah dilantik dalam Jabatan Panitera Muda Hukum pada tanggal 12 Juli 2023.
11.	Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	Panitera Muda Perkara saat ini, Ibu Ella Rosiana, S.H.,M.H mengajukan permohonan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	Rini Haryanti, S.H	Sudah mengikuti Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan pada tanggal 28 November 2023.

Perlu kami sampaikan bahwa untuk pengkaderan jabatan struktural tersebut perlu diadakan diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sesuai dengan jenjang yang ada.

Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, selama tahun 2023 telah mengadakan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yaitu Bimbingan Teknis untuk Tenaga Teknis (BimTek bagi Pejabat Fungsional dan Struktural Kepaniteraan) sedangkan untuk tenaga non teknis, dilakukan Sosialisasi tentang Pengadaan Jasa Konstruksi secara e-purchasing bagi ASN di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Bimbingan teknis lebih banyak diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI secara luring dan daring, karena dengan diklat diharapkan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi berupa peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan, semangat persatuan dan kesatuan, serta pengembangan wawasan.

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI sebagai pusat kendali sedapatnya lebih intensif lagi dalam mengadakan pembekalan kepada aparatur – aparturnya baik untuk Tenaga Teknis maupun Non Teknis dipusat maupun di daerah berupa diklat – diklat, sosialisasi maupun bentuk – bentuk pelatihan yang lain.

### C. PENSUN.

Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia seorang



pegawai maka produktivitas kerjanya pun akan menurun. Berikut adalah daftar pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah purna tugas di tahun 2023 :

**Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tun Surabaya Yang Telah Purna Tugas Pada Tahun 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	PURNA TUGAS TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA</b>				
1.	H. Sugiya, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	01-02-2023	Pensiun Sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor: 00122/13001/AZ/09/22
2.	Drs. Sampirin Hadi S, S.H., M.H.	Panitera	01-11-2023	Pensiun Sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor: 00360/13001/AZ/05/23
3.	H. Setyo Hendaro, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	01-01-2023	Pensiun Sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor: 00574/13001/AZ/07/22
4.	Dra. Wahjuning Handajani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	01-07-2023	Pensiun Sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor: 00173/13001/AZ/03/23
5.	Dra. Y. Harini	Panitera Pengganti	01-02-2023	Pensiun Sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor: 00675/13001/AZ/08/22
6.	Yusnu Sofa	Juru Sita Pengganti	01-10-2023	Pensiun Sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor: 00577/13001/AZ/08/23
<b>Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</b>				
7.	Ach. Suaidi, S.H.	Panitera PTUN Surabaya	01-01-2023	Pensiun Sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor: 00568/13001/AZ/07/22
8.	Ashariyadi, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Surabaya	01-03-2023	Pensiun Sesuai SK Sekretaris MA RI Nomor: 00898/13001/AZ/11/22
9.	Singgih Wahyudi, S.H.	Wakil Ketua PTUN Semarang	01-04-2023	Pensiun karena BUP
10.	H. Ngarbi, S.Sos., M.Hum.	Sekretaris PTUN Semarang	01-09-2023	Pensiun karena BUP
11.	Mohata	Juru Sita Pengganti PTUN Yogyakarta	01 Maret 2023	Pensiun karena meninggal dunia
12.	Muslim, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Yogyakarta	01 Maret 2023	Pensiun karena BUP

Program Pensiun merupakan bagian dari program kesejahteraan yang diharapkan bisa memberikan ketenangan PNS dalam bekerja dan mampu memotivasi untuk meningkatkan produktivitas karena adanya suatu jaminan hidup di masa yang akan datang. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin.

#### **D. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)**

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk membentuk sosok pegawai negeri sipil yang dimaksudkan di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada : Peningkatan semangat dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial atau kepemimpinan, peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 dan 3, bahwa Diklat bertujuan agar : Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi; Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat; Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sasaran Diklat adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Dasar kebijakan Diklat dalam peraturan pemerintah adalah : Diklat merupakan bagian integral dan sistim pembinaan PNS, Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS, Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi, Diklat diarahkan untuk menyiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dalam kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Selama kurun waktu tahun 2023 Diklat/Bimtek yang diikuti oleh Pegawai maupun Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dilaksanakan secara luring/offline (tatap muka) dan daring/online.

**Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tun Surabaya Yang  
Telah Mengikuti Diklat/Bimtek Pada Tahun 2023 :**

NO.	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT/BIMTEK YANG DIKUTI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</b>					
1.	Mardius Septiadi, S.H.	Sekretaris	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	22 s.d. 26 Mei 2023	Lulus
2.	Rini Setiawati, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	22 s.d. 26 Mei 2023	Lulus
3.	Moh. Hairil Anwar, S.Kom., M.H.	Kepala Sub Bagian TURT	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	05 s.d. 09 Juni 2023	Lulus
4.	Surya Dian Enitasari, S.Pd.	Kepala Sub Bagian KPTI	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	20 Maret s.d 07 Agustus 2023	Lulus
5.	Moch. Muchlis, S.H.	Kepala Sub Bagian Rebprog	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	12 s.d. 16 Juni 2023	Lulus
6.	Maulana Bintang Bahari, S.A.P.	Analisis Kepegawaian Pertama	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	10 s.d. 14 Juli 2023	Lulus
7.	Eka Septia Sari, S.E.	Verifikator Keuangan	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	10 s.d. 14 Juli 2023	Lulus
8.	Sri Nawangsih Retnoningtyas, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	03 s.d. 07 Juli 2023	Lulus
9.	Firda Kristanti, A.Md. Akun.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP)	03 s.d. 07 Juli 2023	Lulus
10.	Mardius Septiadi, S.H.	Sekretaris	Sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	22s.d 23 November 2023	Sudah dilaksanakan
11.	Subhan Jufri, A.Md.,S.H.	Kabag. Umum dan Keuangan	Sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	22s.d 23 November 2023	Sudah dilaksanakan

12.	Eko Rusmanto, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	22s.d 23 November 2023	Sudah dilaksanakan
<b>Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</b>					
13.	Leni Susilowati, S.E.	APK APBN Ahli Muda	Pelatihan (E-Learning) dan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	30 Januari s.d. 7 Februari 2023	Lulus
14.	Sri Listiani, S.H., M.Kn.	Hakim	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	21 s.d. 23 Februari 2023	Lulus
15.	Yudi Rinaldi Surachman, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	21 s.d. 23 Februari 2023	Lulus
16.	Sri Listiani, S.H., M.Kn.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	6 s.d. 19 Maret 2023	Lulus
17.	Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	6 s.d. 19 Maret 2023	Lulus
18.	Firman, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	6 s.d. 19 Maret 2023	Lulus
19.	Agus Effendi, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	13 s.d. 15 Maret 2023	Lulus

20.	Djoko Prijono, S.E.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023	13 s.d. 15 Maret 2023	Lulus
21.	Eko Prasetyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023	13 s.d. 15 Maret 2023	Lulus
22.	Muhammad Roihan, S.H.I., M.H.I.	Analisis Perkara Peradilan	Bimbingan Teknis Pemberian Layanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023	13 s.d. 15 Maret 2023	Lulus
23.	Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan TUN	13 s.d. 15 Maret 2023	Lulus
24.	Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	20 Maret s.d. 1 April 2023	Lulus
25.	Ikawati Utami, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	20 Maret s.d. 1 April 2023	Lulus
26.	Ikawati Utami, S.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVIII bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	10 April s.d. 20 Mei 2023	Lulus

27.	Meita Sandra Merely Lengkong, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman dan Penajaman Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023	10 s.d. 12 Mei 2023	Lulus
28.	Dini Pratiwi Pujilestari, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman dan Penajaman Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023	10 s.d. 12 Mei 2023	Lulus
29.	Mariana Ivan Junias, S.H, M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Akses Keadilan dan Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Proses Peradilan di Lingkungan Peratun	24 s.d. 16 Mei 2023	Lulus
30.	Ikawati Utami, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Akses Keadilan dan Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Proses Peradilan di Lingkungan Peratun	24 s.d. 16 Mei 2023	Lulus
31.	Sri Listiani, S.H., M.Kn.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Lulus

32.	Listyorani Imawati, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Lulus
33.	Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Lulus
34.	Ikawati Utami, S.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Lulus
35.	Dini Pratiwi Pujilestari, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Lulus
36.	Dharma Setiawan Negara, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan Level-1 Angkatan I dan II Kerjasama Balitbang Diklat Kumdil MA RI dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	30 Mei s.d. 17 Juni 2023	Lulus
37.	Wiwied Kurniawan, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perkara	Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara TA 2023	21 s.d. 23 Juni 2023	Lulus

38.	Naily Madda Allin, S.E., S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Bimbingan Teknis Standarisasi Layanan Kepegawaian terkait Implementasi Aplikasi SIASN bagi Layanan Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis pada Lingkungan Peradilan TUN	21 s.d. 23 Juni 2023	Lulus
39.	Dwi Ambar Rukmi Pangesti, S.AP.	Analisis SDMA Ahli Pertama	Bimbingan Teknis Standarisasi Layanan Kepegawaian terkait Implementasi Aplikasi SIASN bagi Layanan Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis pada Lingkungan Peradilan TUN	21 s.d. 23 Juni 2023	Lulus
40.	Rachmadi. S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN	21 s.d. 23 Juni 2023	Lulus
41.	Desy Wulandari, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilu Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN	21 s.d. 23 Juni 2023	Lulus
42.	Dharma Setiawan Negara, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan anajemen Administrasi Peradilan secara Blended Learning Gelombang 3 Tahun 2023	12 s.d. 28 Juli 2023	Lulus
43.	Suhendra, S.H.	Panitera	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2023	25 s.d. 27 Juni 2023	Lulus
44.	Eko Prasetyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2023	25 s.d. 27 Juni 2023	Lulus
45.	Isna Kartika Sari, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2023	25 s.d. 27 Juni 2023	Lulus



46.	Agus Effendi, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	17 s.d. 29 Juli 2023	Lulus
47.	Yudi Rinaldi Surachman, S.H, M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	17 s.d. 29 Juli 2023	Lulus
48.	Ceckly Jembly Kereh, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	17 s.d. 29 Juli 2023	Lulus
49.	Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	17 s.d. 29 Juli 2023	Lulus
50.	Dini Pratiwi Pujilestari, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	17 s.d. 29 Juli 2023	Lulus
51.	Desy Wulandari, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2	24 Juli s.d. 5 Agustus 2023	Lulus
52.	Fadholy Hernanto, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2	24 Juli s.d. 5 Agustus 2023	Lulus
53.	Ikawati Utami, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2	24 Juli s.d. 5 Agustus 2023	Lulus

54.	Wiwied Kurniawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan TUN TA 2023	2 s.d. 4 Agustus 2023	Lulus
55.	Nina Oktaviani, S.E.	Operator- Penata Layanan Operasional	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan TUN TA 2023	2 s.d. 4 Agustus 2023	Lulus
56.	Fuad Auliya Rohman	PPNPN Non DIPA	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan TUN TA 2023	2 s.d. 4 Agustus 2023	Lulus
57.	Eko Prasetyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi bagi Badan Publik di Jawa Timur	5 September 2023	Lulus
58.	Ari Susanti, S.E., M.A.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi bagi ASN terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan TUN	4 s.d. 6 Oktober 2023	Lulus
59.	Anugerah Yudha Trissanda, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi bagi ASN terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan TUN	4 s.d. 6 Oktober 2023	Lulus
60.	Fuad Auliya Rohman	PPNPN Non DIPA	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi bagi ASN terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan TUN	4 s.d. 6 Oktober 2023	Lulus
61.	Mariana Ivan Junias, S.H., M.Hum.	Hakim	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian bagi para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	18 s.d. 20 November 2023	Lulus

62.	Wachid, S.H.	Jurusita Pengganti	Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Jurusita dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan TUN	18 s.d. 20 Oktober 2023	Lulus
63.	Ainur Rahman, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti	Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Jurusita dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan TUN	18 s.d. 20 Oktober 2023	Lulus
64.	Rachman Hakim Budi Sulisty, S.E., S.H., M.Kn.	Hakim	Pelatihan Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	21 s.d. 22 Februari 2023	Sudah dilaksanakan
65.	Santi Octavia, S.H., M.Kn.	Hakim	Bimbingan Teknis Akses Keadilan dan Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Keadilan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara	24 s.d. 26 Mei 2023	Sudah dilaksanakan
66.	Reza Adyatama, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Akses Keadilan dan Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Keadilan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara	24 s.d. 26 Mei 2023	Sudah dilaksanakan
67.	Ekarani Nugrahaningrum, S.H., M.Kn.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara secara Blended Learning pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	5 s.d. 16 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
68.	Cusi Aprilia Hartanti, S.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Sudah dilaksanakan

69.	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
70.	Christin Andriani, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
71.	Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d. 16 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
72.	Wiwi Widiastuti, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	12 s.d. 24 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
73.	Agus Dwiyono, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	12 s.d. 24 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
74.	YP. Dwi Sri Setyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara TA 2023	21 s.d. 23 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
75.	Herisman, S.H., S.Sos., M.AP., M.H.	Ketua	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d. 23 Juni 2023	Sudah dilaksanakan

76.	Elwis Pardamean Sitio, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d. 23 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
77.	Muhammad Andy Hakim, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan secara <i>Blended Learning</i> Gelombang 3 Tahun 2023	28 Juni s.d. 13 Juli 2023	Sudah dilaksanakan
78.	Didi Sunardi, S.H., M.H.	Panitera	Bimbingan Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun Anggaran 2023	25 s.d. 27 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
79.	YP. Dwi Sri Setyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun Anggaran 2023	25 s.d. 27 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
80.	Nur Rochman, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Bimbingan Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun Anggaran 2023	25 s.d. 27 Juni 2023	Sudah dilaksanakan
81.	Herisman, S.H., S.Sos., M.AP., M.H.	Ketua	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	26 Juni s.d. 7 Juli 2023	Sudah dilaksanakan
82.	Andri Nugroho Eko Setiawan, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	-	-

83.	Cusi Aprilia Hartanti, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	-	-
84.	Josiano Leo Haliwela, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	-	-
85.	Rachman Hakim Budi Sulisty, S.E., S.H., M.Kn.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	17 s.d. 29 Juli 2023	Sudah dilaksanakan
86.	Preistia, S.A.P., MPA.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian secara Online dari Tempat Tugas Angkatan 11 dan 12 Tahun 2023	25 September s.d. 6 Oktober 2023	Sudah dilaksanakan
87.	Nieke Zulfahanum, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2	24 Juli s.d. 5 Agustus 2023	Sudah dilaksanakan
88.	Trisoko Sugeng Sulisty, S.H., M.Hum.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2	24 Juli s.d. 5 Agustus 2023	Sudah dilaksanakan
89.	YP. Dwi Sri Setyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Bimtek Pengelolaan Administrasi Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 s.d. 4 Agustus 2023	Sudah dilaksanakan
90.	Siti Purnami, S.H.	Juru Sita Pengganti	Bimtek Pengelolaan Administrasi Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 s.d. 4 Agustus 2023	Sudah dilaksanakan

91.	H. Ngarbi, S.Sos., M.Hum.	Sekretaris	Bimbingan Teknis dengan tema "Komunikasi Organisasi, Transformasi Digital Bidang Kearsipan dan Profesionalitas Keprotokolan"	3 s.d. 5 Agustus 2023	Sudah dilaksanakan
92.	Kurniawan Cahya Supraba, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Bimbingan Teknis dengan tema "Komunikasi Organisasi, Transformasi Digital Bidang Kearsipan dan Profesionalitas Keprotokolan"	3 s.d. 5 Agustus 2023	Sudah dilaksanakan
93.	Dewi Eka Muriani, S.Si., M.Si.	Arsiparis Ahli Muda	Bimbingan Teknis dengan tema "Komunikasi Organisasi, Transformasi Digital Bidang Kearsipan dan Profesionalitas Keprotokolan"	3 s.d. 5 Agustus 2023	Sudah dilaksanakan
94.	Cya Purnamasari, A.Md., S.H.	Arsiparis Ahli Pertama	Bimbingan Teknis dengan tema "Komunikasi Organisasi, Transformasi Digital Bidang Kearsipan dan Profesionalitas Keprotokolan"	3 s.d. 5 Agustus 2023	Sudah dilaksanakan
95.	Ety Susanti, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Peserta Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi ASN Terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4 s.d. 6 Oktober 2023	Sudah dilaksanakan
96.	Dony Eka Saputra, S.Kom., M.H.	Pranata Komputer Ahli Muda	Peserta Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi ASN Terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4 s.d. 6 Oktober 2023	Sudah dilaksanakan
97.	Muhammad Agus Wahid, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Peserta Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi ASN Terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4 s.d. 6 Oktober 2023	Sudah dilaksanakan

98.	Niken Widowati	Juru Sita Pengganti	Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	18 s.d. 20 Oktober 2023	Sudah dilaksanakan
99.	Kusuma Firdaus, S.H., M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	18 s.d. 20 Oktober 2023	Sudah dilaksanakan
100.	Kurniawan Cahya Supraba, S.Kom., M.M.	Sekretaris	Sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	22s.d 23 November 2023	Sudah dilaksanakan
101.	Ety Susanti, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	22s.d 23 November 2023	Sudah dilaksanakan
102.	Cya Purnamasari, A.Md., S.H.	Arsiparis Ahli Pertama	Sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	22s.d 23 November 2023	Sudah dilaksanakan
103.	Vinaricha Sucika Wiba, S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial	21 s.d 24 Februari 2023	-
104.	Anita Linda Sugiarto, S.Tp.,S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia.	6 s.d 18 Maret 2023	-



105.	Vinaricha Sucika Wiba, S.H.,M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Negara Pemerintahan Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	13 s.d 15 Maret 2023	-
106.	Cahyeti Riyani, S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia.	20 Maret s.d 1 April 2023	-
107.	Dedi Wisudawan Gamadi, S.H.,M.Kn.	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman Dan Penajaman Pemeriksaan Sengkea Lingkungan Hidup Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023	10 s.d 12 Mei 2023	-
108.	Anita Linda Sugiarto, S.Tp.,S.H.,M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Akses Keadilan Dan Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prooses Perdilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	24 s.d 26 Mei 2023	-
109.	Cahyeti Riyani, S.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Akses Keadilan Dan Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prooses Perdilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	24 s.d 26 Mei 2023	-
110.	Anita Linda Sugiarto, S.Tp.,S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d 16 Juni 2023	-

111.	Vinaricha Sucika Wiba, S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pemilihan Kepala Desa dan Peningkatan Perangkat Desa bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	5 s.d 16 Juni 2023	-
112.	Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d 23 Juni 2023	-
113.	Vinaricha Sucika Wiba, S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Angkatan XIX bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	12 Oktober s.d 8 November 2023	-
114.	Presetyo Wibowo, S.H.,M.H.	Hakim	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha	18 s.d 20 Oktober 2023	-
115.	Dedi Wisudawan Gamadi, S.H.,M.Kn.	Hakim	Pelatihan Singkat Temu Wicara di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur	24 s.d 27 Oktober 2023	-
116.	Delta Arga Prayudha, S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Temu Wicara di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur	24 s.d 27 Oktober 2023	-

117.	Presetyo Wibowo, S.H.,M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Temu Wicara di Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur	24 s.d 27 Oktober 2023	-
118.	Rosiana, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perkara	Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023	21 s.d 23 Juni 2023	-
119.	Ella Rosiana, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perkara	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	26 s.d 28 Juni 2023	-
120.	Risang Ade Putra, S.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	26 s.d 28 Juni 2023	-
121.	RR. Femy Krisnaningtyas, S.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	26 s.d 28 Juni 2023	-
122.	Andrie Wibowo, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	12 s.d 24 Juni 2023	-
123.	Endah Kristiati, S.H.	Juru Sita Pengganti	Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023	18 s.d 20 Oktober 2023	-
124.	Ari Nurseta, S.H.	Juru Sita Pengganti	Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2023	18 s.d 20 Oktober 2023	-
125.	Rifiani Rina Martianna, S.Psi.	Arsiparis Ahli Muda	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	30 Januari 2023	-
126.	Ririn Hendaryati, S.H.	Pustakawan Ahli Muda	Pelatihan Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan Angkatan 3	13 s.d 17 Februari 2023	-

127.	Rifiani Rina Martianna, S.Psi.	Arsiparis Ahli Muda	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis	22 Februari 2023	-
128.	Rifiani Rina Martianna, S.Psi.	Arsiparis Ahli Muda	Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	4 s.d 5 April 2023	-
129.	Rifiani Rina Martianna, S.Psi.	Arsiparis Ahli Muda	Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Berdasarkan PMDN Nomor 83 Tahun 2022	11 s.d 12 April 2023	-
130.	Sri Sumiyatunningsih, S.H.	Pranata Keuangan APBN/ Bendahara	Microlearning Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara 1. Studi Kasus Perpajakan atas Belanja Barang dan Belanja Modal terkait Perubahan UU HPP 2. Studi Kasus Perpajakan atas transaksi dgn KKP 3. Tips dan Trik membaca LPJ Bendahara dan Berita Acara Rekonsiliasi	20 s.d 22 Juni 2023  4 s.d 6 Juli 2023  3 s.d 5 Oktober 2023	-  -  -
131.	Dedianto Ramali, S.H.,M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	E-Learning Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Angkatan 5	31 Juli s.d 11 Agustus 2023	-
132.	Eko Budi Prastyo, S.E.	Analisis Tata Laksana	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan V	22 Agustus s.d 18 September 2023	-
133.	Indriyani Wulandari, S.E.	Analisis Kepegawaian Pertama	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Angkatan 11 Tahun 2023	5 s.d 18 September 2023	-
134.	Bariq Azmi Rizaldy, A.Md.	Pengelola BMN	Pelatihan Pengadaan BARang/Jasa Pemerintah Level 1 Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Angkatan III	18 September s.d 5 Oktober 2023	-

135.	Sekar Jayasari, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kompetensi Bagi ASN Terhadap Penguasaan Teknologi	4 s.d 6 Oktober 2023	-
------	----------------------	---	--	----------------------------	---

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersumber dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sedangkan sumber lainnya adalah dari Pihak Ketiga untuk membiayai kegiatan administrasi dalam penyelesaian perkara.

Dari kedua sumber tersebut dapat diuraikan pengelolaannya dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.01.2.548940/2023 TGL. 30 NOVEMBER 2022

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.548940/2023 tertanggal 30 November 2022 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Bahasa gaul atau kerennya disebut sebagai “DIPA 01”, kata 01 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. DIPA 01 ini merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki oleh keempat lingkungan peradilan.

Dalam pengelolaannya DIPA 01 ini telah mengalami beberapa kali revisi, sebagai berikut :

- 1) Revisi DIPA Ke-1 tertanggal 28 Desember 2022;
- 2) Revisi DIPA Ke-2 tertanggal 16 Februari 2023;
- 3) Revisi DIPA Ke-3 tertanggal 14 April 2023;
- 4) Revisi DIPA Ke-4 tertanggal 07 Juli 2023;
- 5) Revisi DIPA Ke-5 tertanggal 01 September 2023;
- 6) Revisi DIPA Ke-6 tertanggal 13 September 2023;
- 7) Revisi DIPA Ke-7 tertanggal 03 Oktober 2023;
- 8) Revisi DIPA Ke-8 tertanggal 03 November 2023;
- 9) Revisi DIPA Ke-9 tertanggal 01 Desember 2023.

Adapun realisasi anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini :

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1.	548940	PTTUN Surabaya	10.635.875.000	2.876.223.000	1.971.500.000	10.407.623.809	2.853.071.244	1.953.531.716	98,26
2.	526767	PTUN Surabaya	9.542.018.000	1.830.613.000	698.500.000	9.348.801.948	1.824.671.321	697.697.517	98,34
3.	531830	PTUN Semarang	9.635.217.000	1.558.353.000	68.200.000	9.609.819.733	1.527.186.499	68.192.075	99,50
4.	578801	PTUN Yogyakarta	5.391.327.000	1.417.848.000	158.500.000	5.188.130.666	1.401.116.360	153.787.000	96,78

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang hampir mendekati 100%, merupakan gambaran bahwa pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta satuan kerja di bawahnya sudah sangat baik.

## 2. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.05.2.548941/2023 TGL. 30 NOVEMBER 2022

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.05.2.548941/2022 tertanggal 30 November 2022 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahasa gaul atau kerennya disebut sebagai “DIPA 05”, kata 05 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. DIPA 05 ini, merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki khusus di lingkungan Peradilan Militer dan TUN, sedangkan lingkungan Peradilan yang lainnya memiliki DIPA dengan kode tersendiri sesuai Unit Eselon 1 / Ditjennya masing-masing.

Dalam pengelolaannya DIPA 05 ini telah mengalami beberapa kali revisi, sebagai berikut :

- 1) Revisi DIPA Ke-1 tertanggal 26 Juni 2023;

Adapun realisasi anggaran DIPA 05 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini:

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1.	548941	PT TUN Surabaya	0	173.600.000	0	0	171.600.000	0	98,85
2.	526768	PTUN Surabaya	0	46.850.000	0	0	46.005.116	0	98,20
3.	531831	PTUN Semarang	0	43.626.000	0	0	42.890.000	0	98,31
4.	578802	PTUN Yogyakarta	0	36.166.000	0	0	35.391.550	0	97,86

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan satuan kerja di bawahnya sudah sangat baik.

## 3. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA

Adapun keadaan pengelolaan Keuangan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

No.	URAIAN	JUMLAH		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Saldo Awal	Rp. 6.231.100	-	-
2.	Penerimaan	Rp. 1.750.000	-	-
3.	Biaya Panggilan	-	-	-
4.	Biaya Pemberitahuan	-	-	-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-
6.	Biaya Penerjemah/Sumpah/Saksi	-	-	-
7.	Pengiriman Biaya Perkara	-	-	-
8.	Materai	-	Rp. 70.000	-
9.	Hak-hak Kepaniteraan	-	Rp. 70.000	-
10.	Alat Tulis Kantor	-	Rp. 1.380.000	-
11.	PNBP	-	-	-
	a. Pencabutan Banding	-	-	-
	b. Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	-	-	-
	c. Redaksi	-	-	-
	d. Leges	-	-	-
	Jumlah	Rp. 7.981.100	Rp. 1.520.000	Rp. 6.461.100

e. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No.	URAIAN	JUMLAH		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Saldo Awal	Rp. 988.000	-	-
2.	Penerimaan	-	-	-
3.	Biaya Panggilan	-	-	-
4.	Biaya Pemberitahuan	-	-	-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-
6.	Biaya Penerjemah/Sumpah/Saksi	-	-	-
7.	Pengiriman Biaya Perkara	-	-	-
8.	Materai	-	-	-
9.	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-
10.	Alat Tulis Kantor	-	-	-
11.	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	-	-	-
Jumlah		Rp. 988.000	-	Rp. 988.000

**4. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Januari s/d Desember 2023 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya se-wilayah hukum, yang kemudian dilaporkan ke Badan Urusan Administrasi MA RI, adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

NO	POS MAP	URAIAN JENIS PNBP	PTUN SBY	PTUN SBY	PTUN SMG	PTUN YOGYA	JUMLAH
1.	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 777.777	-	-	Rp. 9.406.000	Rp. 10.183.777
2.	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp. 11.567.999	-	-	-	Rp. 11.567.999
3.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 5.184.975	Rp. 2.337.500	Rp. 8.512.190	-	Rp. 16.034.665
4.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 30.000	Rp. 2.110.000	Rp. 2.840.000	Rp. 280.000	Rp. 5.260.000
5.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 110.000	Rp. 17.370.000	Rp. 9.190.000	Rp. 790.000	Rp. 27.460.000
6.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 2.020.500	Rp. 66.210.750	Rp. 25.978.400	Rp. 5.210.145	Rp. 99.419.795
7.	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp. 11.216.020	-	-	-	Rp. 11.216.020
8.	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp. 23.635.063	-	-	-	Rp. 23.635.063
JUMLAH			Rp. 54.542.334	Rp. 88.028.250	Rp. 46.520.590	Rp. 15.686.145	Rp. 204.777.319

**B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

**1. Pengadaan**

Pada tahun 2023 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kegiatan belanja modal berupa:

- a. Pengadaan Jasa Sewa Mesin Foto Copy Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp522.000.000,00 (Lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan metode tender cepat sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: W3-TUN/148/PL.08/1/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 31 Desember 2023.



- b. Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/ Toilet Disabilitas) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: W3-TUN/828.06/PL.08/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 6 Juni 2023.
- c. Pengadaan Perencanaan Renovasi Gedung (Atap/ Plafond) kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya TA 2023 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 1341/SEK.02.06/PL1.1.5/IX/2023 tanggal 8 September 2023 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 21 September 2023.
- d. Pengadaan Pengawasan Renovasi Gedung (Atap/ Plafond) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya TA 2023 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 1348/SEK.02.04/PL1.1.5/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 18 Desember 2023.
- e. Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Fisik Renovasi Gedung (Atap/ Plafond) Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun Anggaran 2023 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1.270.000.000,00 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan metode e-purchasing sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor: 1349/SEK.02.02/PL1.1.5/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 18 Desember 2023.
- f. Pengadaan Meubelair dan AC dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp342.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan metode e-purchasing sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 1445-1446/SEK.02.01/PL1.1.5/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dan telah selesai pada tanggal 30 November 2023.
- g. Pengadaan Meubelair Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya TA. 2023 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan metode penunjukkan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 1761/SEK.02.04/PL1.1.2/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan telah selesai pada tanggal 19 Desember 2023.

## 2. Pemeliharaan

Untuk kegiatan pemeliharaan kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2022 terdiri atas:

- a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan meliputi pemeliharaan gedung kantor, halaman kantor, tempat ibadah/ mushola, pos jaga, dan garasi kendaraan dinas pimpinan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 501.592.000,00 (lima ratus satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- b. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya berupa pemeliharaan rumah negara dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi pemeliharaan alat inventaris kantor berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), personal komputer, laptop, printer, AC Split, dan inventaris kantor dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp319.477.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

### 3. Penghapusan

Pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Timor dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Suzuki RC 100.

### 4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana berupa kondisi gedung kantor, fasilitas kantor (berupa peralatan dan mesin) kendaraan dinas, dan rumah dinas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat dilihat dalam matrik di bawah ini :

No	Sarana Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
	<b>Sarana/Prasarana Gedung</b>		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	12	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	2	
7	Ruang Kepaniteraan	2	
8	Ruang Kesekretariatan	6	
9	Ruang Arsip	4	
10	Ruang Perpustakaan	1	
11	Ruang Gudang	2	
12	Ruang Server	1	
13	Ruang Mushola	1	
14	Ruang Pos Jaga	1	
15	Ruang PTSP	1	
16	Ruang Tamu Terbuka	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Kesehatan/ Laktasi	1	
19	Toilet	6	
20	Dapur	1	
	<b>Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
1	A.C. Split	64	
2	Alat Pembersih Lainnya	1	
3	Audio Mixing Portable	1	
4	Audio Visual	1	
5	Brankas	2	
6	Camera Conference	1	
7	Camera Digital	1	
8	CCTV	6	
9	Faccimile	3	
10	Filing Cabinet Besi	68	

11	Finger Printer	3	
12	Headmachine Besar	1	
13	Kipas Angin	8	
14	Kursi Besi/ Metal	431	
15	Kursi Kayu	33	
16	Lambang Garuda Pancasila	1	
17	Lambang Instansi	1	
18	LCD Projector/ Infocus	2	
19	Lemari Besi/ Metal	32	
20	Lemari Kayu	41	
21	Loudspeaker	4	
22	Meja Kerja Kayu	129	
23	Meja Komputer	10	
24	Meja Rapat	40	
25	Meja Resepsionis	1	
26	Mesin Fotocopy Folio	1	
27	Mesin Ketik Elektronik/ Selektik	2	
28	Mesin Ketik Manual	2	
29	Microphone	1	
30	Palu Sidang	1	
31	Partisi	1	
32	Pataka	1	
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	
34	Photo Tustel	1	
35	Genset	1	
36	Rak Besi	11	
37	Rak Kayu	3	
38	Roll Opek	6	
39	Sice	30	
40	Sketsel	1	
41	Sound System	3	
42	Tabung Pemadam Api	2	
43	Tangki Air	1	
44	Telephone (PABX)	2	
45	Televisi	6	
46	Tiang Bendera	2	
47	UPS	7	
48	Unit Tranceiver	4	
49	Wireless Amplifier	1	
50	Auto Switch	1	
51	Internet	1	
52	Komputer Jaringan Lainnya	1	
53	Lap Top	37	
54	Line Printer	31	
55	Modem	1	
56	P.C Unit	70	
57	Rak Server	2	
58	Router	2	
59	Scanner	4	
60	Server	2	
61	Monografi	2	
62	Pompa Air	1	
63	Gergaji Chain Saw	1	
64	Lemari Display	1	
65	Papan Visual/ Papan Nama	1	
66	White Board	3	

67	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	
68	Treng Air/ Tandon Air	1	
69	Gordyn/ Kray	12	
70	Software Komputer	1	

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I.</b>	<b>Rumah Dinas</b>					
1	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-	
3	Rumah Dinas Hakim	6	-	6	-	
4	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	1	-	

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Mobil Toyota Altis	2008	-	V	-	
2.	Mobil Toyota Vios	2009	-	V	-	
3.	Mobil Hyundai Accent	2004	-	V	-	
4.	Mobil Toyota Innova	2009	-	V	-	
5.	Mobil Mitsubishi Pajero	-	V	-	-	Sewa
6.	Mobil Toyota Camry	-	V	-	-	Sewa
7.	Mobil Toyota Hiace	-	V	-	-	Sewa
8.	Honda GL Pro	2006	-	V	-	
9.	Honda Kharisma	2005	-	V	-	

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### ❖ IMPLEMENTASI E-COURT

Implementasi E-Court di Tahun 2023 telah mencapai 100% yaitu sejumlah 190 Perkara dari 190 Perkara. Pencapaian ini dimulai sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Pencapaian E-Court telah ditingkatkan di tahun ini dan tahun berikutnya akan tetap dipertahankan.

#### ❖ IMPLEMENTASI SIPP

Implementasi SIPP untuk tahun 2023 meliputi penyelesaian 190 perkara banding yang masuk dan terdaftar melalui Aplikasi SIPP dengan sisa perkara sebanyak 14 perkara. Kesemuanya berjalan dengan baik dan lancar.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Berdasarkan Penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) dari Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2022 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2022, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh nilai “A” (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TASPM.04-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2022.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh predikat Terakreditasi dengan nilai “A” (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TASPM.06-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2022.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memperoleh predikat Terakreditasi dengan nilai “A” (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TSAPM.8-TUN/QMR/SERTIFIKAT/11/2020.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memperoleh predikat Terakreditasi dengan nilai “A” (Excellent) sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TAPM.18-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2019.

#### **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Layanan Pengaduan, Meja Informasi, dan juga E-Court corner yang masih dalam tahap pengajuan account telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sarana dan Prasarana telah tersedia dengan baik serta petugas pelayanan terpadu yang dilaksanakan dengan sistem piket bergiliran setiap minggu dibawah koordinator kepaniteraan hukum dan kepaniteraan perkara. Pelaksana piket layanan dilaksanakan oleh Panitera Pengganti dan staf yang ditunjuk dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer sebagai asisten umum.

#### **C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

##### **a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya**

1. **SIRATUS** (Sistem Perkara Putus) Aplikasi yang menampilkan konten yang sama dengan Data Perkara, namun keunggulan yang ditonjolkan adalah kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan maupun pencari data untuk keperluan akademik.
2. Aplikasi **MasBro** (Manajemen Surat Berbasis Online) ini merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang menyediakan informasi bagi user / penggunanya yang dipakai untuk mempermudah manajemen agenda surat masuk dan surat keluar, membuat kartu kendali surat, membuat disposisi surat, melacak posisi surat, manajemen lainnya di dalam pengembangan secara berlanjut

untuk kepentingan kantor secara menyeluruh, efektif dan efisien menyesuaikan perkembangan informasi dan teknologi.

3. Aplikasi **SiLobby** (Aplikasi Lobby) merupakan aplikasi berbasis intranet yang membantu memonitor keberadaan para tamu yang berkepentingan supaya bisa dimonitor oleh pimpinan, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris untuk menjadi pengendalian internal di kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam salah satu fungsi pengawasan dan pelayanan menuju wilayah bebas dari korupsi, dan sebagai wujud wilayah birokrasi bersih melayani kepada para pencari keadilan maupun pihak lainnya yang datang ke kantor.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

1. HAI (Help, Answer and Innovate) adalah Pelayanan Informasi Pengadilan berbasis website melalui aplikasi live chat. Dengan HAI dapat berkomunikasi secara real time, every time, every where dengan Petugas PTSP PTUN Surabaya.
2. MAP (Manajemen Administrasi Peradilan) adalah aplikasi untuk mendaftarkan surat kuasa dan mengajukan berbagai macam permohonan seperti Permohonan Surat Keterangan Bebas Perkara, Salinan Putusan bagi para pihak, Pihak Intervensi, Permohonan magang dan lain-lain.
3. PTSP Online diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan informasi pengadilan tanpa perlu datang ke kantor PTUN Surabaya.
4. SISTAL (Asisten Digital) merupakan pelayanan informasi pengadilan berbasis mobile yang terkoneksi dengan aplikasi whatsapp business PTUN Surabaya.
5. E-Layanan merupakan layanan yang diperuntukkan sebagai absensi di PTUN Surabaya untuk Tamu Non Persidangan dan Tamu Pelayanan.
6. iRES (Informasi Resmi) merupakan sarana untuk mengakses seluruh informasi publik milik PTUN Surabaya yang tersedia dalam bentuk QR Code.

c. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

1. Anjungan Gugatan Mandiri (AGM). Aplikasi Anjungan Gugatan Mandiri adalah Sistem Informasi berbasis website untuk pembuatan Surat Gugatan, Surat Permohonan dan Surat Kuasa Penggugat/Pemohon yang formatnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan-perubahannya, yang dapat di akses secara online.
2. Sistem Informasi Persidangan (SIPPERS) Aplikasi Sistem Informasi Persidangan (SIPPERS) adalah Sistem Informasi berbasis website berguna untuk informasi persidangan yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dapat di akses secara online.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

1. PANDAI (Pedoman Pelayanan Mahasiswa Magang secara Interaktif) sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomer: W3-TUN3/209/HM.02.3/SK/1/2023.
2. E-JAMU LAKU (Janji Temu Konsultasi Layanan Bantuan Hukum) sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomer: W3-TUN3/209/HM.02.3/SK/1/2023.
3. SILANI (Sistem Layanan Terintegrasi) sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomer: W3-TUN3/209/HM.02.3/SK/1/2023..

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Salah satu fungsi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini dijalankan oleh unsur Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Ketua dan Wakil Ketua) dibantu oleh Pejabat yang ditunjuk. Adapun yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah para aparatur Pengadilan (Hakim, pejabat dan pegawai) baik yang berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sendiri maupun yang berada di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi.

Hakim Pengawas Bidang yang merupakan kepanjangan tangan Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dalam melakukan pengawasan internal di setiap bidang dan bagian telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1036/KP.04.6/7/2023 tertanggal 13 Juli 2023.

#### **A. EVALUASI**

Kegiatan pengawasan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan, yang untuk hal-hal tertentu didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Secara formalnya, hasil pengawasan oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, disampaikan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, hakim tinggi, pejabat dan pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi.

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka kegiatan pengawasan di daerah / Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Evaluasi penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan baik Teknis maupun Non Teknis, dengan berpedoman pada Buku IV tentang Pengawasan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI;
2. Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah disampaikan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada waktu kegiatan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

3. Melakukan peneguran-peneguran dan atau pemeriksaan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan peneguran / pemeriksaan oleh Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
4. Melakukan tindakan-tindakan lain selain sebagaimana tersebut diatas, atas perintah Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Untuk Tahun Anggaran 2023 ini, Pembinaan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke seluruh satuan kerja di daerah dan Pengawasan Kesekretariatan maupun Kepaniteraan oleh Hakim Pengawas Daerah telah dilaksanakan dengan baik. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

**Pembinaan :**

1. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/353/PS.03/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Maret 2023;
2. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/354/PS.03/2/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Maret 2023;
3. Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/693/PS.03/5/2023 tanggal 4 Mei 2023 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Mei 2023;

**Pengawasan Bidang Kepaniteraan :**

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1048/PS.04/7/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah dilaksanakan **pengawasan bidang Kepaniteraan** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2023;
2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1050/PS.04/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah dilaksanakan **pengawasan bidang Kepaniteraan** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 Agustus 2023;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1052/PS.04/7/2027 tanggal 13 Juli 2023 telah dilaksanakan **pengawasan bidang Kepaniteraan** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Agustus 2023;

**Pengawasan Bidang Kesekretariatan :**

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1049/PS.04/7/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah dilaksanakan **pengawasan bidang Kesekretariatan** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2023;



2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1051/PS.04/5/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah dilaksanakan **pengawasan bidang Kesekretariatan** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 Agustus 2023;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1053/PS.04/7/2027 tanggal 13 Juli 2023 telah dilaksanakan **pengawasan bidang Kesekretariatan** pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 9 Agustus 2023;

## **BAB VII P E N U T U P**

### **A. KESIMPULAN**

Dari seluruh uraian yang ada dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selama tahun anggaran 2023 telah dapat berjalan dengan baik.

Dari pemaparan seluruh kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tupoksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut :
  - a. Tugas Teknis Yuridis, meliputi :
    - 1) Sebagai Pengadilan Tingkat Banding;
    - 2) Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
    - 3) Sebagai Pengadilan yang memutus sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
  - b. Tugas Administrasi, meliputi :
    - 1) Pelaksanaan administrasi persidangan;
    - 2) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan;
    - 3) Pelaksanaan administrasi umum dan pembangunan;
  - c. Tugas Pengawasan, meliputi :
    - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional);
    - 2) Pengawasan terhadap aparatur pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
    - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - d. Tugas Pelayanan Masyarakat, meliputi :
    - 1) Pelayanan prima terhadap masyarakat;
    - 2) Pelayanan prima terhadap internal pengadilan;
    - 3) Pelayanan prima instansi atasan dan atau instansi lain / pemangku kepentingan lainnya;
  - e. Tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar jelas arah dan sasaran organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menyusun Rencana Strategi 2020 – 2024 dengan memperhatikan dan menganalisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal pengadilan sehingga diperoleh key success factor (faktor-faktor yang dapat mensukseskan dalam pencapaian sasaran) dan juga diperoleh faktor-faktor penghambat dalam mencapai sasaran untuk dipakai di dalam merumuskan strategi-strategi dalam mencapai sasaran organisasi;

3. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah relative sedikit, sehingga beban kerja Majelis Hakim dan pejabat fungsional pengadilan lainnya dalam menangani perkara juga relative ringan;
4. Penyelesaian perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu tidak melebihi 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima hingga diputusnya perkara-perkara tersebut;
5. Promosi, Mutasi dan Pensiun bagi aparatur dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah melalui analisa dan evaluasi dari Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
6. Pengelolaan Keuangan baik yang bersumber dari dana APBN dan pengelolaan keuangan perkara telah dilaksanakan dengan baik, yang tercermin dengan adanya realisasi, pembukuan dan laporan keuangan yang tersaji dari Januari hingga Desember 2023;
7. Pengelolaan Sarana Prasarana telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari kegiatan pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan laporan kondisi sarana dan prasarana yang tersaji dan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;

#### **B. REKOMENDASI**

1. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap personil Pengadilan baik teknis maupun non teknis dengan sistem pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna dihasilkan tenaga yang terampil secara teknis, organisatoris dan professional di bidangnya;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana baik gedung maupun fasilitas gedung mohon untuk dipenuhi dengan menggunakan skala prioritas sesuai dengan dana yang tersedia, sebagai sarana penunjang kinerja dalam pelaksanaan tupoksi;
3. Peningkatan kualitas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan baik dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
4. Kekurangan pegawai, terutama untuk staf golongan II, mohon juga segera dipenuhi, khususnya bagi satker-satker yang sangat minim tenaga stafnya;

Surabaya, 26 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001